



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

PENYESUAIAN PROGRAM TERHADAP ANGGARAN INFRASTRUKTUR TAHUN 2025

Brigita Diaz Primadita
Analisis Legislatif Ahli Pertama
brigita.primadita@dpr.go.id

Nidya Waras Sayekti
Analisis Legislatif Ahli Madya
nidya.ws@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Pada 6 Februari 2025, Komisi V DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU) untuk membahas evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran (TA) 2024 dan program kerja TA 2025. Dalam rapat tersebut, disampaikan realisasi anggaran Kementerian PU TA 2024 mencapai 93,5% atau Rp169,82 triliun dari total anggaran Rp181,62 triliun, dengan capaian fisik mencapai 95,48%. Dari 2.946 paket kontraktual sebesar Rp111,65 triliun, telah terkontrak pada tahun 2024 sebanyak 2.945 paket sebesar Rp111,32 triliun atau 99,7% dari target. Capaian ini telah menghasilkan infrastruktur strategis, antara lain: 6 proyek ketahanan pangan, 3 proyek revitalisasi sekolah/madrasah, 11 proyek Ibu Kota Nusantara, dan 61 proyek strategis lainnya.

Pagu anggaran Kementerian PU tahun 2025 disepakati sebesar Rp29,57 triliun, yang terdiri dari non-rupee murni Rp16,31 triliun dan rupee murni Rp13,26 triliun. Pagu anggaran tersebut merupakan tindak lanjut atas Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Sebelum dilakukan efisiensi, pagu anggaran Kementerian PU tahun 2025 yaitu sebesar Rp110,95 triliun atau lebih rendah sebesar Rp70,67 triliun atau 38,91%.

Dengan pagu anggaran yang disepakati, terdapat beberapa program yang akan dilakukan penyesuaian pada tahun 2025, antara lain: perawatan rutin jalan dan jembatan, pembangunan jembatan gantung, serta dalam bidang sumber daya air. Namun demikian, rincian program kerja Kementerian PU tahun 2025 masih akan dibahas lebih lanjut dalam rapat kerja berikutnya antara Komisi V DPR RI dengan Kementerian PU. Komisi V DPR RI meminta kepada Kementerian PU untuk mengutamakan program padat karya serta menghitung dan melakukan perbaikan komposisi anggaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Ekonom Universitas Gadjah Mada, Akhmad Akbar Susanto, menyampaikan bahwa penyesuaian anggaran tahun 2025 di Kementerian PU ini memang suatu urgensi yang harus dilakukan pemerintah. Hal ini dilakukan dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi terutama dalam kondisi fiskal yang kurang sehat akibat defisit anggaran yang besar; meningkatnya kebutuhan pembiayaan untuk program prioritas; dan menghindari tekanan berlebih pada utang pemerintah. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan akan banyak menyerahkan pembangunan infrastruktur kepada swasta. Ahli tata kota Universitas Trisakti, Nirwono Joga, mengatakan hal ini memerlukan perhatian lebih mengingat swasta akan memilih proyek infrastruktur yang menghasilkan keuntungan yang cepat dan akan berdampak pada aspek pemerataan pembangunan.

Di sisi lain, Ekonom Universitas Indonesia, Fithra Faisal Hastiadi berpendapat efisiensi anggaran memiliki dampak positif. Adanya efisiensi dapat menjadi momentum pembenahan bagi kementerian/lembaga yang selama ini tidak mengalokasikan anggaran sebagaimana mestinya. Selain itu, dengan meningkatkan keterlibatan swasta dalam pembangunan infrastruktur juga merupakan cara pemerintah untuk tidak mendominasi ragam pekerjaan yang harusnya dapat dilakukan pihak swasta.

Atensi DPR

Pelaksanaan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025 menjadi perhatian Komisi V DPR RI khususnya bagi Kementerian PU. Komisi V DPR RI menyepakati pagu anggaran Kementerian PU tahun 2025 sebesar Rp29,57 triliun. Namun demikian, program kerja Kementerian PU tahun 2025 akan dibahas lebih lanjut dalam rapat kerja berikutnya. Komisi V DPR RI meminta kepada Kementerian PU untuk melakukan perbaikan komposisi serta menentukan prioritas program kerja yang benar-benar penting dalam mendukung pelayanan masyarakat dan perekonomian. Komisi V DPR RI perlu melakukan pengawasan pada proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan apabila swasta lebih banyak berperan dalam pembangunan infrastruktur.

Sumber

kompas.id, 6 Februari 2025;
nasional.kontan.co.id, 6 Februari 2025;
pu.go.id, 7 Februari 2025;
tempo.co, 4 Februari 2025;
ugm.ac.id, 5 Februari 2025.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Venti Eka Satya
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.
Ulayya Sarfina
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi
Muhammad Insan F.
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa

